

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Alfitra, 2012, *Hukum Pembuktian dalam Berbicara Pidana Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cet.3 Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Ali Imron dan Muhammad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, UNPAM Press, Pamulang Tangerang Selatan.
- Andi Sofyan dan Amir Ilyas, 2013, *HUKUM ACARA PIDANA Suatu Pengantar*, Mahakarya Rangkang, Sleman Yogyakarta.
- Didik Hendro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Kadi Sukarna, 2016, *Alat Bukti Petunjuk menurut KUHP dalam Perspektif Teori Keadilan*, UNNES Press, Semarang.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.
- Mustafa Bola, 2017, *Paradigma Hukum Hakim*, Hasanuddin University Press, Makassar.
- P.A.F Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Riadi Asrai Ahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, PT Raja Grafindo Prasada. Depok.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, P.T Grafindo Persada, Yogyakarta.
- S.R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet.3 Stria Grafika, Jakarta.
- Soenarto Soeridibroto, 2006, *KUHP dan KUHP*, P.T Raja Grafindo Prasada, Jakarta.

Subekti Sudarsono, 2017, *Hukum Pidana Dasar- Dasar Hukum Pidana dan RUU KUHP*, Mummadiyah University Press, Surakarta.

Yurizal, 2021, *Aspek Pidana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*, Media Nusa Creative Cet.16, Malang.

**WEBSITE :**

Sovia Hasnah, Hukum Online, *Testimoni De Audit*, Diakses Pada 4 November 2021.

Saktian Naris Pradita, “Kedudukan Saksi A De Charge Pada Prises Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”,Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Diakses pada tanggal 28 Maret 2023.

**JURNAL :**

Barunggam Siregar, “Nilai Kebeneran Saksi Meringankan Menjadi Saksi”  
Jurnal Lex Lata, Vol. 9, Nomor 3, November 2019.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (*KUHP*).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (*KUHAP*).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/Pn.Pre

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010 tentang Perluasan Makna Saksi.